

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK
DALAM PENANGKAPAN IKAN DI DESA KALUPAPI KECAMATAN
BANGKURUNG KABUPATEN BANGKEP**

HARYONO SOMUN / D 101 08 160

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul tinjauan kriminologis penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di desa Kalupapi kecamatan Bangkurung kabupaten Bangkep. Dengan identifikasi masalah faktor – faktor apa yang mempengaruhi penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di desa Kalupapi dan bagaimana upaya penanggulangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di desa Kalupapi. Yang bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi maraknya penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di desa kalupapi dan sejauh mana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor (POLSEK) kecamatan Labobo Bangkurung (Lo. Bangkurung).

Penelitian ini dilakukan di desa Kalupapi kecamatan Bangkurung kabupaten Banggai Kepulauan dengan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi nelayan di desa Kalupapi menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah pertama tingkat kesadaran masyarakat masih rendah terhadap bahaya bahan peledak bagi diri sendiri dan lingkungan. Kedua adanya keterlibatan oknum kepolisian. Ketiga himpitan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Keempat tidak memiliki keahlian lain. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak polsek Lo. Bangkurung adalah pertama upaya preventif yang meliputi sosialisasi/penyuluhan dan patroli rutin. Kedua upaya represif yaitu berupa penindakan sesuai hukum yang berlaku bagi mereka yang tertangkap tangan.

Kata Kunci : penggunaan bahan peledak, penangkapan ikan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kabupaten Banggai Kepulauan adalah salah satu kabupaten yang terdapat di provinsi Sulawesi Tengah dan beribukota di Salakan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.160,46 km (darat) dan 18.828,10 km (laut).¹ Luas hamparan laut di wilayah ini lima kali lipat dibandingkan dengan luas daratannya. Sebagai wilayah kepulauan, laut menjadi sektor utama yang selalu dan harus digeluti. Pasalnya, di sanalah terdapat potensi

dan kekayaan alam yang pantas diolah dan diusahakan sebagai penopang kehidupan penduduk Bangkep.

Kabupaten ini memiliki potensi sumber daya ikan yang melimpah dan memberikan peluang yang sangat besar untuk dimanfaatkan secara ekonomis. Potensi ini merupakan salah satu aset pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat setempat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banggai Kepulauan apabila dilakukan pemanfaatan secara optimal dan bertanggung jawab.

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Kabupaten

¹Wikipediaensiklopedibebas, "Kabupaten Banggai Kepulauan". [http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kabupaten Banggai Kepulauan](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kabupaten_Banggai_Kepulauan), 20 Juli 2013. 10:12

Banggai Kepulauan sudah tentu dapat mengancam kelestarian potensi sumberdaya yang ada. Penangkapan ikan dengan bahan peledak mematikan ikan tanpa diskriminasi, karang dan *biota avertebrata* yang tidak bercangkang.² Praktek semacam ini selain menimbulkan kerugian ekologis, juga menimbulkan dampak sosial ekonomi yang sangat besar terhadap negara dan daerah, serta dapat memicu berbagai perselisihan sosial yang memprihatinkan terutama akibat menurunnya produktivitas ekosistem terumbu karang. Jika hal ini berlangsung terus, maka diperkirakan dalam waktu yang singkat terumbu karang di kabupaten Banggai Kepulauan akan berkurang serta biota-biota yang berasosiasi dengan terumbu karang terutama yang bernilai ekonomis dan terlebih yang langka dapat menjadi punah. Kegiatan penangkapan ikan tidak ramah lingkungan tidak hanya mengancam keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan laut, tetapi juga memacu peningkatan jumlah masyarakat miskin di wilayah tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 8 ayat (1):

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan. Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”³.

Dan sanksi pidananya yaitu pasal 84 ayat (1) :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”⁴.

Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang turut serta dalam melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu pada pasal 55 ayat (1) :

“Dihukum sebagai orang yang melakukan pristiwa pidana :

1. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
2. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memaki kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya–upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan”⁵.

Namun dalam kenyataannya, penggunaan bahan peledak oleh nelayan dalam penangkapan ikan masih tetap ada di beberapa lokasi perairan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Kondisi ini apabila tetap dilakukan oleh nelayan, bisa berdampak buruk bagi kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan yang ada di perairan Kabupaten Banggai Kepulauan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, maka sangat menarik untuk dikaji dengan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan pada masyarakat desa Kalupapi kecamatan Bangkurung kabupaten Bangkep ?

²Hamid, *Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak*, Jakarta, Gramedia, 2007, hlm.,17

³Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁴ibid

⁵Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bagaimana upaya penanggulangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di Desa Kalupapi kecamatan Bangkurung kabupaten Bangkep ?

II. PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Kalupapi

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.⁶ Ada bermacam - macam faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma - norma, terutama norma hukum.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.⁷

Kegiatan pengeboman ikan merupakan penyebab terbesar bagi kerusakan ekosistem terumbu karang di Kecamatan Bangkurung khususnya dan Kabupaten Bangkep umumnya. Bahan peledak seberat 0,5 Kg yang diledakkan pada dasar terumbu karang dapat menyebabkan karang pada radius tiga meter ujung - ujung karang bercabang menjadi patah-patah. Sedangkan ikan pada radius 5

meter dari pusat ledakan langsung mati karena bagian tubuh pecah, pada radius 15 – 20 meter ikan akan hilang keseimbangan, berenang dengan cepat dan tidak terarah. Ikan yang terkena ledakan pada radius seperti ini akan mengapung kepermukaan, diperkirakan sebanyak 40% sisanya tenggelam dan jatuh didasar perairan. Tidak semua ikan yang berada diantara sela-sela karang dapat diambil dan diperkirakan sisa yang tertinggal sekitar 20% dan merupakan potensi yang terbuang percuma. Ikan yang berada agak jauh dari pusat ledakan, biasanya terlihat tanpa adanya kerusakan fisik tetapi jika dilihat secara seksama ikan tersebut terasa menjadi lebih lemas dan lentur karena hampir seluruh tulangnya menjadi remuk.

Edwin H Shuterland dalam teorinya yang terkenal, “differtial association” mengatakan bahwa :

1. Tingkah laku jahat itu dipelajari.
2. Tingkah laku jahat itu dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi.
3. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok – kelompok orang yang intim/dekat.
4. Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk (a) teknik – teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif – motif, dorongan – dorongan, rasionalisasi – rasionalisasi, dan sikap – sikap.
5. Arah khusus dari motif – motif dan dorongan – dorongan itu dipelajari melalui definisi – definisi dari aturan – aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.
6. Seseorang menjadi delinquent karena definisi – definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi – definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
7. Asosiasi diferensial itu mungkin bermacam – macam dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola – pola kriminal dan anti kriminal melibatkan

⁶Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media, 2012, hlm., 23.

⁷Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm., 64.

semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain.

9. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan – kebutuhan dan nilai – nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan – kebutuhan dan nilai – nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan – kebutuhan dan nilai – nilai yang sama.⁸

Teori ini yang kemudian digunakan oleh penulis sebagai acuan untuk menjelaskan bagaimana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan ini terjadi dan berkembang di desa Kalupapi serta faktor – faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Seperti yang di kemukakan oleh Shuterland bahwa kejahatan itu dipelajari, aktivitas penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di desa Kalupapi yang masih berlangsung hingga saat ini pun dipelajari. Mereka belajar dalam kurun waktu dan proses yang cukup lama. Mereka belajar cara merakit dan menggunakan bom yaitu antara lain cara meracik pupuk sehingga bisa digunakan sebagai bahan utama, cara meracik bahan – bahan untuk sumbu, cara mengikat sumbu yang baik dan benar, cara mengukur atau menyesuaikan antara kedalaman air dan panjang sumbu yang akan di pasang pada bom, cara membuat bom ikan dengan sumbu kontak (detenator), cara mendeteksi keberadaan ikan atau yang mereka sebut “*nyarandouw*” dan lain sebagainya. Mereka tertarik untuk mempelajari hal ini karena hasilnya yang menjanjikan. Setiap hari yang mereka lihat dan dengar adalah hasil melimpah yang dihasilkan dari penggunaan bahan peledak ini. Bisa dibayangkan hanya dalam waktu beberapa hari saja mampu menghasilkan berton – ton ikan yang secara otomatis uang yang didapatkan pun akan lebih banyak. Selain itu juga hal ini sudah seperti mata pencaharian pokok bagi mereka karena sebagian besar dari mereka menggunakan bom dalam menangkap ikan.

Dalam mempelajari cara merakit dan menggunakan bom ikan ini tentunya mereka tidak belajar sendiri, tetapi mereka belajar dan diajari oleh para orang tua dan orang – orang terdekat mereka yang telah lebih dahulu dan lebih pengalaman dalam hal merakit dan menggunakan bom ikan. Pada praktek penangkapan ikan dilaut mereka yang dalam proses pembelajaran ini hanya sebagai pemeran pembantu. Sementara yang berperan aktif adalah mereka yang lebih berpengalaman. Nanti setelah mereka sudah dianggap mampu barulah mereka yang menggantikan peran dari para senior mereka.

Dalam hal perakitan dan penggunaan bom ikan ini mereka tidak hanya terfokus pada apa yang mereka dapat dari orang tua dan pendahulu mereka, tetapi mereka mencoba melakukan berbagai pengembangan – pengembangan. Seperti halnya wadah dari bom ikan ini, pada awalnya mereka menggunakan batok kelapa. Namun karena proses pekerjaan dengan menggunakan wadah buah kelapa sangat lama dan rumit, dimana batok kelapa tersebut harus dalam keadaan kering dan isi dalam kelapa harus benar-benar habis dikerok dan dikeluarkan. Jadi mereka menggunakan botol bekas minuman biasanya botol bir karena cukup praktis. Pada sumbu awalnya mereka hanya menggunakan sumbu bakar, sekarang mereka telah menggunakan sumbu kontak (detenator). Teknik menyelam yang tadinya hanya mengandalkan kekuatan nafas sekarang mereka menggunakan kompresor sebagai alat bantu pernapasan yang dapat menjangkau kedalaman hingga puluhan meter.

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di desa Kalupapi ini berlangsung tanpa adanya protes dari nelayan lain. Oleh karena tingkat kesadaran masyarakat desa Kalupapi yang masih sangat minim tentang bahaya penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap ikan dan terumbu karang serta biota laut lainnya. Sehingga masyarakat masih menempuh jalan pintas yang melanggar hukum. Masyarakat nelayan umumnya belum menyadari bahwa pengeboman ikan dalam jangka panjang akan

⁸Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.,75

merugikan mereka. Mereka tidak paham bahwa karang adalah tempat hidup ikan yang jika dihancurkan justru ikannya pun akan menghilang. Mereka hanya tahu menggunakan bahan peledak itu hasilnya lebih banyak. Disisi lain, secara sosial biasanya nelayan pengebom cukup dermawan, yaitu setelah mengambil ikan yang besar - besar pada saat pengeboman maka nelayan yang kebetulan berada dekat lokasi pengeboman dipersilakan untuk mengambil ikan yang tersisa. Begitu pula pada saat tiba di desa mereka tidak pernah lupa menjual sebagian dari hasil pengeboman kepada nelayan tetangga dan masyarakat umum yang ada di desa.

Nelayan yang menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan di desa Kalupapi ini mengetahui bahwa aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang mereka lakukan sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan. Namun hal ini tetap dilakukan karena beberapa faktor yaitu antara lain bahan mudah ditemukan, sederhana dalam proses perakitan dan penggunaannya, memperoleh tangkapan lebih banyak dan resiko kecelakaan yang timbul terhadap diri dianggap sebagai kelalaian sendiri.

Para nelayan pun sadar yang mereka lakukan adalah melanggar hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan pasal 8 ayat :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan. Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan

kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , diatur dengan Peraturan Pemerintah.”⁹

Namun dengan alasan himpitan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari mereka tetap melakukan aktivitas ini. Persoalan hukum mereka kesampingkan karena mereka mengaku tidak memiliki keterampilan atau pekerjaan lain untuk

⁹Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

mencari nafkah. Jadi, meskipun beresiko tertangkap oleh aparat kepolisian mereka tetap melakukan pemboman ikan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak kepolisian sektor Lo. Bangkurung, selama 4 tahun terakhir tidak pernah ada satupun kasus penggunaan bahan peledak dalam ikan yang terungkap. Menurut bapak Ipda L. Hasanuddin, SH, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kecamatan Lo. Bangkurung (wawancara pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013) hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat kepolisian yang sangat minim sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal. Patroli rutin yang dilakukan oleh pihak Polsek Lo. Bangkurung hanya 2 kali dalam sebulan dan pada hari penting seperti pemilu. Sehingga membuat para nelayan pengguna bom ikan dapat dengan leluasa melaksanakan aksinya ditambah lagi seringkali informasi tentang patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah lebih dahulu diketahui oleh para nelayan pengguna bom ikan. Sikap masyarakat setempat yang tidak kooperatif (tertutup) dengan pihak kepolisian juga menjadi penyebabnya. Selain itu juga anggota yang berada di wilayah Polsek Lo. Bangkurung sangat terbatas sehingga kesulitan untuk mengungkap pemboman ikan yang masih marak terjadi hingga saat ini. Di daerah kecamatan Bangkurung sendiri yang terdiri dari 12 desa hanya ada satu orang anggota kepolisian yang ditempatkan.

Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang di katakan oleh masyarakat setempat. Menurut masyarakat setempat (wawancara pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013) mengatakan bahwa ada oknum kepolisian yang terlibat langsung didalam pemboman ikan yang terjadi didesa Kalupapi. Oknum inilah yang diduga sebagai pemasok pupuk cap matahari yang menjadi bahan baku utama untuk membuat bom ikan di daerah ini. Berdasarkan informasi oknum ini juga ini mempunyai kapal penampung yang beroperasi untuk menampung hasil tangkapan dari para nelayan pengguna bom ikan. Jadi hal ini menjadi semacam legitimasi bagi para nelayan

pengguna bom ikan untuk tetap menjalankan aktivitasnya.

Aktivitas pemboman ikan di desa Kalupapi masih marak terjadi hingga saat ini. Hal ini terlihat dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis terhadap aktivitas penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di desa Kalupapi selama kurang lebih 6 bulan. Yakni pada bulan September 2012 – Maret 2013 terjadi sekitar 73 kali aktivitas pemboman ikan yang dilakukan oleh nelayan. Jadi, dalam setahun terjadi kurang lebih $73 \times 2 = 146$ kali pemboman ikan di desa Kalupapi. Maka bisa dibayangkan apabila hal ini terjadi hingga kurun waktu 10 tahun yaitu $73 \times 2 \times 10 = 1.460$ kali. Data tersebut pun diambil hanya berdasarkan kapasitas kapal yang digunakan oleh nelayan yaitu kapal dengan kapasitas 20 ton keatas. Belum termasuk nelayan lain yang menggunakan kapal dengan kapasitas dibawah 20 ton dan nelayan – nelayan kecil yang menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan hanya sebagai sampingan. Jelaslah hal ini adalah masalah yang sangat serius, apabila dibiarkan berlarut – larut maka jaminannya adalah kelangsungan hidup ikan, terumbu karang dan biota laut lainnya yang ada di perairan Bangkep berada diambang kepunahan.

B. Upaya Penanggulangan Penggunaan Bom Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Kalupapi

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah kegiatan destruktif. Yang apabila dibiarkan secara berlarut – larut maka hal ini akan mengancam kelangsungan hidup dan kelestarian ikan, terumbu karang dan biota laut lainnya. Pihak kepolisian yang saat ini mempunyai kewenangan untuk mengatasi hal ini pun mengaku bahwa penanganan dalam hal penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan ini bukanlah hal yang mudah. Karena hal ini sudah termasuk budaya atau cara menangkap ikan yang telah lama dilakukan oleh nelayan di desa Kalupapi. Untuk itu perlu strategi – strategi khusus dalam menangani hal ini.

Hukum berfungsi mengatur, hukum juga sebagai pemberi kepastian, pengamanan,

pelindung dan penyeimbang, yang sifatnya tidak hanya adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Potensi hukum ini terletak pada dua dimensi utama dari fungsi hukum yaitu preventif dan fungsi represif.¹⁰

Dalam hal upaya penanggulangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di desa Kalupapi ini dari pihak polsek Lo. Bangkurung (wawancara pada hari Selasa 15 Januari 2013) melakukan beberapa upaya yakni upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi aktifitas pemboman ikan yang marak dilakukan oleh nelayan khususnya di desa Kalupapi. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh polsek Lo. Bangkurung adalah antara lain:

a. Sosialisasi Atau Penyuluhan

Sosialisasi atau penyuluhan di pusatkan kepada masyarakat di desa – desa nelayan yang terindikasi melakukan aktifitas pemboman ikan tentang bahaya bom ikan terhadap diri sendiri dan ekosistem laut. Melalui sosialisasi atau penyuluhan ini pihak kepolisian berharap masyarakat di desa – desa nelayan yang terindikasi menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan mengetahui tentang bahaya bom ikan tersebut tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga untuk kelestarian dan kelangsungan biota laut. Melalui sosialisasi ini juga pihak kepolisian menjelaskan tentang undang – undang yang mengatur tentang larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan yaitu Undang – undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan. Tepatnya pada Pasal 8 dan ketentuan pidananya pada Pasal 84.

b. Melakukan Patroli Rutin

Melakukan patroli yang dilaksanakan kurang lebih 2 kali dalam sebulan dan pada hari – hari penting seperti

pada saat moment – moment pemilu. Patroli ini dipusatkan pada nelayan – nelayan yang melakukan aktifitas pemboman ikan dan kapal – kapal asing yang menyeludupkan pupuk cap matahari sebagai bahan utama dalam pembuatan bom ikan. Dalam hal kegiatan patroli ini, pihak kepolisian mencari tempat – tempat yang berpotensi bagi para nelayan pengguna bom ikan serta mendatangi pulau – pulau yang disinyalir sebagai tempat para nelayan pengguna bom ikan. Selain itu juga mereka mencari kapal – kapal asing yang datang dari luar daerah untuk menjual pupuk cap matahari. Yang berdasarkan informasi mereka melakukan transaksi jual – beli itu ditengah laut atau pada pulau – pulau yang tersembunyi. Konon, pupuk cap matahari yang diperjual – belikan ini adalah hasil seludupan dari negara tetangga yaitu dari Tawau (Malaysia).

2. Upaya Represif

Upaya represif yaitu berupa tindakan – tindakan yang dilakukan terhadap para nelayan yang tertangkap tangan menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan. mereka para nelayan yang tertangkap akan di proses secara hukum dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.

I. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab penggunaan bahan peledak yaitu tingkat kesadaran masyarakat masih rendah, keterlibatan aparat kepolisian, himpitan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari serta tidak memiliki keahlian lain.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah upaya preventif yaitu sosialisasi dan patroli rutin. Dan upaya represif yaitu berupa penindakan sesuai hukum yang berlaku bagi mereka yang tertangkap tangan. namun hal ini masih belum efektif.

¹⁰Lili Rasjidi Dan I.B.Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm.,123

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka saran penulis melalui skripsi ini adalah :

- a. Perlu adanya penanganan yang serius dari pemerintah terhadap maraknya penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di desa Kalupapi khususnya dan kabupaten Bangkep pada umumnya.
- b. Mempererat koordinasi diantara pihak – pihak yang terkait serta melibatkan masyarakat dalam penanganan pemboman ikan ini sehingga fungsi pengawasan berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
Hamid, *penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak*, Jakarta, Gramedia, 2007.
Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media, 2012.
Lili Rasjidi Dan I.B.Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

B. Peraturan Perundang - undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

C. Bahan Internet

- Wikipediaensiklopedibebas, "*kabupaten banggai kepulauan*". http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banggai_Kepulauan, 2013

BIODATA

HARYONO SOMUN, Lahir di Laina, 17 Desember 1989, Alamat Rumah Jalan Mangga 1 Nomor 20 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6282197171289, Alamat Email achie_black89@yahoo.com

